

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kemajuan jaman telah merubah pandangan tentang perempuan, mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah dan harus selalu di rumah. Sedangkan laki-laki merupakan makhluk yang harus berada di luar rumah, kemudian dengan adanya perkembangan jaman dan emansipasi menyebabkan perempuan memperoleh hak yang sama dengan laki-laki.¹

Di Indonesia, perjuangan untuk memperoleh hak yang sama secara tegas dimulai dengan RA. Kartini, walaupun banyak perempuan-perempuan lain di Indonesia yang memiliki perjuangan yang sama, tetapi perjuangan RA. Kartini merupakan perjuangan cita-cita agar perempuan memiliki pemikiran dan tindakan yang modern. Dengan demikian, adanya persamaan hak di berbagai bidang kehidupan telah menggeser pandangan terdahulu, sebagaimana dikemukakan Nilakusuma sebagai berikut:

Wanita dan laki-laki mempunyai tempatnya masing-masing di dalam kehidupan kemasyarakatan. Dan kedua jenis manusia tersebut dapat menempati tempatnya masing-masing tanpa menjadi kurang hak-sama, karena fikiran, kecerdasan, menentukan nilai yang sama antara laki-laki dan wanita.²

¹ Gurniwan K. Pasya.2010. *Peranan Wanita Dalam Kepemimpinan Dan Politik*. Bandung : Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (FPIPS UPI)

² Nilakusuma, S. 1960. *Wanita di dalam dan di luar Rumah*. Bukittinggi : NV. Nusantara. Hal. 151-152

Pemikiran dan tindakan modern ini salah satunya terkait dengan keikutsertaan perempuan dalam kehidupan politik. Problem ini memang telah menjadi perhatian utama di jaman globalisasi ini, kesetaraan *gender* yang selalu disuarakan oleh perempuan sedunia demi memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama dengan laki-laki tidak terkecuali dalam masalah politik. Islam merupakan satu-satunya agama yang sangat menjunjung harkat dan martabat perempuan, Islam pun pada hakikatnya tidak membedakan laki-laki maupaun perempuan secara ekstrim, hal ini ditunjukkan dalam Al-Qur'an yaitu:

“....Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan.”
(QS.Ali-Imran :195) ³

Ayat Al-Qur'an di atas bukan satu-satunya ayat yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Islam tidak memihak salah satu dari keduanya (baik laki-laki maupun perempuan) melainkan karena imannya semata. Namun faktanya, manusia secara nyata mendeskreditkan peran perempuan.

Padahal ayat Al-Qur'an yang lainnya menjelaskan:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl: 97) ⁴

Bahkan sejarah mencatat, bangsa Arab pernah menganggap perempuan sebagai aib. Hal ini disebabkan, karena bagi mereka

³ Lihat terjemahan QS. Ali-Imran ayat 195

⁴ Lihat terjemahan Qs. An-Nahl ayat 97

perempuan tidak bisa banyak berbuat seperti laki-laki. Misalnya dalam hal berperang, mencari harta dan lain sebagainya. Namun sekali lagi, Islam hadir dengan suatu bukti bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa sama sekali tidak berkonteks laki-laki atau perempuan. Allah tidak pilih kasih dalam hal pahala dan ganjaran. Begitu pula Allah tidak pilih kasih dalam hal dosa ataupun hal kewajiban-kewajibannya sebagai hamba termasuk pula kewajiban-kewajiban terhadap agamanya. Perempuan dianggap makhluk yang lemah bahkan penghalang bagi kemajuan negara. Persepsi demikian masih banyak berkembang, tidak terkecuali oleh perempuan sendiri. Meskipun demikian sadar atau tidak, perempuan-perempuan di dunia termasuk di Indonesia berusaha menghadirkan kemaslahatan bagi sesama manusia lainnya.

Peran perempuan bahkan telah mencapai hingga ranah politik yang selama ini masih menjadi perdebatan berkelanjutan. Padahal keterkaitan perempuan dalam dunia politik bukan hal yang baru. Politik dalam banyak arti ternyata tidak selalu harus berhubungan dengan partai politik, parlemen ataupun kekuasaan seperti yang banyak diasumsikan oleh publik pada umumnya. Politik dalam arti lainnya adalah mengurus masyarakat. Oleh karena itu perempuan dalam berpolitik tidak harus masuk partai politik ataupun masuk parlemen. Tapi bagaimana kemudian perempuan mampu lebih banyak berperan membangun masyarakat dan bangsa di ranah yang lain.

Pada zaman nabi, istri pertama nabi Muhammad saw, yakni Siti Khadijah juga turut membantu nabi untuk mengurus urusan rakyat di masa itu dalam hal-hal yang ditentukan, semisal dalam segi pembangunan intelektualitas ataupun keterampilan hidup. Sementara Aisyah ra. pun pernah memimpin para tentara serta sahabat nabi dalam sebuah peperangan yang dikenal sebagai perang unta pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Singkatnya, perempuan mengenal politik telah berabad-abad lalu, dimulai dari tangan-tangan para wanita (istri-istri) nabi Muhammad saw tersebut.

Dewasa ini, umat Muslim khususnya di Indonesia, mulai memperdebatkan isu-isu yang berkaitan dengan relasi perempuan dan politik. Tanpa sadar gerakan-gerakan Islam muncul dengan membawa sekian solusi yang dianggap solutif, termasuk gerakan Salafi sendiri.

Kehadiran gerakan Salafi sebagai gerakan dakwah yang menyerukan kepada pemurnian agama mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 1990, yakni ketika mulai banyak pelajar Indonesia dari Timur Tengah kembali ke tanah air, yang bukan saja mempunyai pengetahuan Islam yang memadai tapi juga mempunyai *concern* melaksanakan Islam atau ber-Islam secara benar.

Dakwah Salafi muncul terutama di Jawa dan kota-kota besar. Selain Bandung, gerakan Salafi berkembang pesat juga di Yogyakarta. Di Yogyakarta dakwah Salafi muncul dipimpin oleh Abu Nida. Di Bandung sendiri jamaah Salafi berkembang pada lingkup dan pinggiran dan belum

memasuki *mainstream* muslim seperti masjid Salman ITB. Beda halnya dengan di Yogyakarta dimana jamaah Salafi sudah memasuki kampus-kampus bahkan menjadikannya basis pergerakan seperti di Universitas Gadjah Mada.⁵

Dalam perkembangannya, jamaah Salafi di Yogyakarta sendiri mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan segala dinamikanya. Abu Nida, pendiri jamaah Salafi di Yogyakarta datang pertama kali di Yogyakarta pada tahun 1985. Sebelumnya dia mengajar di Pesantren al-Mukmin Ngruki, Solo kemudian di Pesantren Ibnul Qoyyim, DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) di Yogyakarta.⁶

Jamaah Salafi di Yogyakarta berkembang semakin pesat dengan kehadiran Ja'far Umar Thalib dan mendirikan pesantren Ihya as-Sunnah di Degolan Kaliurang pada tahun 1993.⁷ Ja'far sendiri adalah lulusan LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab) dan Institute Maududui Pakistan. Ja'far mempelajari tentang dakwah Salafi ketika dia bergabung dengan perang Afghanistan dengan arahan Muqbil bin Hadi al-Wadi'i dari Dar al-Hadith, Dammaj Yaman.

⁵ Emy Rubi Astuti, *Eksklusi Sosial Dalam Perilaku-Perilaku Kesalehan: Proses Eksklusi Sosial Perempuan-perempuan Salafi di Yogyakarta*. Banjarmasin: Annual Conference on Islamic Studies, 2010. Hal. 429. Emy Rubi Astuti melakukan penelitian terhadap kelompok Salafi ini selama 3 bulan dengan mengikuti kajian-kajian di masjid Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

⁶ .Ali, Burhan. 2007. "Salafism and Overpopulation: A Challenge for Indonesia" *A Conference Paper on Women, Religion and Globalization*, Center for Religious and Cross-cultural Studies. Gadjah Mada University, Yogyakarta.

⁷ Persepsi ini muncul karena Ihya as-Sunnah Degolan merupakan pelopor bagi pesantren-pesantren salafi yang lain. Pesantren ini giat mengirimkan para santri dan alumnya berdakwah di daerah-daerah. Dari kegiatan dakwah ini, lahirlah pusat-pusat gerakan dakwah salafi di berbagai daerah di Indonesia. Lebih lanjut lihat artikel Ahmad Bunyan Wahib yang berjudul Gerakan Dakwah Salafi Pasca Laskar Jihad. dapat diakses di <http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/ern-iv-02.pdf>. hal. 11.

Dalam perkembangannya, jamaah Salafi di Yogyakarta mengalami berbagai macam dinamika yang akhirnya memecah jamaah mereka menjadi beberapa kelompok termasuk juga memarginalkan kelompok Ja'far Umar Thalib. Berdasarkan catatan ICG (*International Crisis Group*) pada tahun 2004 tercatat bahwa Jamaah Salafi di Yogyakarta terpecah menjadi dua Golongan besar; Kelompok non FKAJW (*Forum Komunikasi Ahlu Sunnah wal-Jamaah*) dan kelompok Pemurni. Kelompok Pemurni ini menolak segala bentuk asosiasi dengan kelompok Islam lainnya baik dalam urusan politik ataupun praktek keagamaan. Selain itu mereka juga menolak segala macam bentuk bantuan dana dari kelompok Islam lain.

Fokus utama dalam studi ini adalah perspektif kelompok Salafi di Yogyakarta mengenai keikutsertaan wanita dalam aspek politik. Dipilihnya gerakan Salafi dalam studi ini karena dari sisi ideologi, gerakan Salafi mengusung ideologi puritan dengan slogannya kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah dengan mencontoh amalan para Sahabat dan *al-salaf al-sālih*. Gerakan Salafi ini dikenal sebagai gerakan dakwah eksklusif yang dengan mudah menganggap sesat kelompok dan gerakan lain. Selain itu, gerakan dakwah Salafi dikenal sebagai gerakan dakwah anti *hizbiyyah*, sebuah kelompok gerakan yang anti politik.⁸

Dari sifat anti politik tersebut diharapkan kajian mengenai kelompok ini dapat difokuskan terhadap aktivitas kelompok Salafi di Yogyakarta yang dikaitkan dengan kenyataan bahwa kelompok ini juga

⁸ lihat artikel Ahmad Bunyan Wahib yang berjudul Gerakan Dakwah Salafi Pasca Laskar Jihad. dapat diakses di <http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/ern-iv-02.pdf>. hal. 2

muncul dengan ideologi yang cukup mengundang kontroversi terkait perannya dalam aspek politik di Indonesia.

Perempuan-perempuan Salafi sendiri dikenal cukup tertutup meskipun itu dengan sesama perempuan lainnya yang memang bukan dari golongan mereka. Hal ini yang kemudian menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan perempuan Salafi. Di tengah-tengah isu *gender* yang kian gencar diperjuangkan demi mendapatkan kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki khususnya pada bidang politik, namun nampaknya perempuan-perempuan Salafi justru tenang dan cukup aman dengan golongan mereka sendiri, bahkan terkesan mengasingkan diri dari isu-isu tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan satu rumusan masalah yaitu:

“Bagaimana perspektif kelompok Salafi di Yogyakarta terhadap relasi wanita dan politik?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah peneliian selesai. Tujuan penelitian pada dasarnya memberikan informasi mengenai apa yang akan diperoleh setelah selesai melakukan penelitian.⁹ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah meneliti perspektif gerakan Salafi tentang kedudukan wanita dalam politik pada wilayah internal dan eksternal pemerintahan.

Wilayah internal pemerintahan penulis memfokuskan pada perspektif Salafi tentang pemimpin wanita, emansipasi wanita dalam wilayah politik (sebagai anggota DPR misalnya atau masuk dalam institusi pemerintahan lainnya), serta partisipasi dalam pemilu (pemberian suara). Sementara wilayah eksternal politik yang dimaksud yaitu perannya sebagai warga negara pada wilayah politik dalam artian politik islam.

⁹ M. Iqbal Hasan. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 44.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan mengenai pengembangan pengetahuan gerakan Islam seperti Salafi khususnya mengenai perspektif tentang wanita dalam gerakan itu sendiri.
2. Diharapkan mampu membangkitkan minat para penulis berikutnya dibidang yang sama sebagai tindak lanjut dari penulisan ini sehingga pemahaman tentang pemikiran politik Islam terkait kedudukan wanita dalam politik semakin lengkap.

E. KERANGKA DASAR TEORI

Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai topik permasalahan yang akan diteliti oleh oleh peneliti maka perlu untuk menyusun kerangka dasar teori sebagai landasan berfikir guna menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang akan diteliti.

Keberadaan teori sebagai unsur dalam penelitian sangat di perlukan, mengingat fungsinya sebagai pedoman dan landasan untuk memahami berbagai permasalahan atau fenomena yang menjadi kajian. Melalui teori akan dapat di jelaskan secara sistematis mengenai hubungan antar konsep/variabel yang satu dengan yang lainnya dalam sebuah penelitian. Atau juga dapat dikatakan bahwa teori merupakan pola pikir

yang sistematis yang dapat menjelaskan adanya suatu fenomena dimana fenomena tersebut dapat juga sebagai kerangka pemecahan masalah.

Menurut Sopyan Efendi, Teori adalah:

“...Serangkaian asumsi , konsep, konstrak , definisi dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep....”¹⁰

Sedangkan Koentjaraningrat mengatakan :

“... Teori merupakan pengaturan mengenai sebab akibat atau mengenai suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti disatu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat....”¹¹

Kemudian menurut Hoy dan Miskel teori adalah seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi¹². Relasi perempuan dan politik dalam Islam yang mengikuti ideologi gerakan puritan seperti gerakan Salafi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Gerakan Sosial

Secara umum Gerakan Sosial memiliki definisi yang luas karena beragamnya ruang lingkup yang dimilikinya. Giddens

¹⁰ Masrin Singarimbun dan Sopian Effendi. 1989. “Metode Penelitian Survei” .LP3ES. Hal.37

¹¹ .Ibid, hal. 3

¹² .Hoy dan Miskel dalam Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung , hal. 55

(1993) menyatakan bahwa gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama; atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*).¹³

Dalam pengertian di atas, gerakan dalam hal ini gerakan sosial diartikan sebagai bentuk resistensi dari kelompok masyarakat terhadap perubahan yang terjadi. Sementara itu, sepanjang sejarah gerakan mengalami pergeseran paradigma. Saat ini banyak aktivis gerakan yang meyakini bahwa sebuah perubahan yang mendasar untuk membutuhkan tiga syarat yaitu *pertama*, adanya ideologi alternatif, *kedua*, adanya organisasi yang kuat yang akan menjadi penopang dukungan rakyat dan *ketiga*, adanya momentum yang tepat.¹⁴

Sedangkan menurut Tumer & Kilian (1957) merumuskan gerakan sosial (*Social Movement*) sebagai suatu kolektifitas yang berlangsung dalam waktu yang agak lama dan mempunyai tujuan mengadakan perubahan atau menentang terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat.¹⁵

Untuk menjelaskan apa itu gerakan Islam, maka perlu dijelaskan pada bagian ini mulai dari definisi gerakan sosial. Oleh karena gerakan Islam itu sendiri bagian dari gerakan sosial.

¹³ . Suharko, *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*, A verroes Press, Malang, 2006, hal.1

¹⁴ Timur Mahardika, *Gerakan Massa; Mengupayakan Demokrasi dan Keadlian Secara Damai*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000. Hal. 31

¹⁵ .Ibid, hal. 34

Gerakan sosial adalah salah satu bentuk dari perilaku kolektif (collective behavior), tetapi akan ada perbedaan antara gerakan sosial dan perilaku kolektif. Apa yang membedakannya dari perilaku kolektif?¹⁶

- a. Gerakan sosial memiliki pengorganisasian yang lebih rapi
- b. Gerakan sosial dibuat secara sengaja dan terencana dengan baik
- c. Bisa berlangsung sangat lama

Aswab Mahassin mencoba memetakan anatomi gerakan sosial melalui tiga indikator yang paling tidak melalui indikator tersebut mampu diperoleh dan dianalogikan dan diperoleh profil sebuah gerakan sosial dengan beberapa ciri. Ketiga indikator tersebut adalah:

- a. Basis Massa

Aswab Mahassin menyebutkan bahwa kebanyakan gerakan massa diprakarsai oleh golongan menengah sedangkan kelompok bawah seringkali menjadi objek dari sebuah gerakan yang dilakukan oleh kelompok menengah tersebut. Keberhasilan sebuah gerakan sosial dalam hal ini ditentukan oleh kualitas dan kuantitas dari gerakan tersebut. Indikator kualitas dalam gerakan, menurut *Gellner* ditentukan oleh tingkat kesadaran

¹⁶ David A Locher.2002. *Collective Behavior*. New Jersey: Pearson Education. Hal. 223

dan rasionalitas masa dari gerakan tersebut. Sedangkan dari kuantitas, George Simmel mengatakan bahwa kuantitas massa merupakan variable yang sangat menentukan bagi sebuah kinerja gerakan massa dalam menjalankan roda pergerakan organisasi mereka.

b. Ideologi dan tema

Ideologi dan tema dari sebuah gerakan massa seringkali menjadikan kejayaan dan romantisme masa lalu sebagai motivator penggerak dan melahirkan sebuah energy pergerakan yang cukup kuat. Dalam kasus pergerakan agama, romantisme akan kejayaan dan kegemilangan zaman keemasan para nabi dan khalifah seringkali menjadi bahan acuan dari bahan bakar penyemangat motivasi yang sering digunakan.

c. Organisasi, strategi dan taktik yang digunakan

Suatu gerakan umumnya selalu memakai berbagai kegiatan seperti kelompok-kelompok diskusi, perkumpulan atau yayasan yang bergerak dibidang tertentu atau berbagai bentuk komunitas yang pada akhirnya meluas menjadi sebuah pergerakan. Gerakan yang dimaksud bias berbagai bentuk, salah satunya adalah partai politik.

Strategi suatu pergerakan sangat erat terkait dengan situasi dan kondisi lingkungan dimana persoalan tersebut tumbuh dan berkembang, sehingga dengan demikian strategi sebuah

organisasi tak dapat disamakan karena ia sangat terkait pada ruang dan waktu. Dalam satu waktu menurut Aswab Mahassin, ketiadaan partai maupun gerakan yang cukup kuat bisa memunculkan taktik koalisi, aliansi atau sejenisnya sebagai manifestasi kesadaran posisi suatu gerakan yang belum memiliki basis yang kuat sebagai sarana berjuang yang dapat diterima dalam kondisi masyarakat yang plural dan kompleks.¹⁷

Dalam masyarakat yang semakin majemuk, dimana kultur dan kontra kultur berkembang biak, mudah sekali berkembang gerakan sosial dengan berbagai isu penting. Secara umum, gerakan sosial berkaitan dengan perubahan sosial karena gerakan sosial tersebut menghendaki perubahan yang terjadi di masyarakat, bangsa dan Negara. Gerakan sosial mudah muncul pada masyarakat pluralistik yang sistemnya belum mampu menyalurkan banyak keinginan-keinginan masyarakat dengan baik. Jadi adanya kesenjangan antara harapan dan kemampuan sistem untuk menyalurkannya. Setiap organisasi sosial tentunya memiliki ideology, visi, misi dan tujuan yang jelas. Dengan ideologi itulah, tujuan organisasi sosial yang akan diperjuangkan menjadi sangat penting. Aberle membagi tipologi tersebut sebagai berikut:¹⁸

¹⁷ Aswab Mahassin. 1989. *Pola Gerakan Pinggiran*. Dalam *Prisma* No. 7 Tahun XVIII. Jakarta. LP3ES. Hal 4

¹⁸ David A Locher, Op. Cit. hal 234-238

1) Gerakan Sosial alternatif

Gerakan ini memiliki tujuan untuk melakukan perubahan terbatas dan hanya menyangkut individu saja, yaitu mendorong mereka untuk meninggalkan sikap dan perilaku tertentu dan menggantinya dengan sikap dan perilaku khusus yang ditetapkan gerakan. Gerakan ini tidak memberikan ancaman terhadap tatanan sosial karena hanya menginginkan segelintir orang berubah dan perubahan khusus. Misalnya, gerakan Keluarga Berencana.

2) Gerakan Sosial Penebusan

Gerakan ini berusaha memusatkan perhatiannya pada individu pada individu, tetapi perubahan yang diinginkan sangat radikal/dinamis. Tujuannya adalah melakukan transformasi utuh terhadap beberapa orang-orang tertentu. Gerakan ini menginginkan orang-orang menjadi bagian dari kelompok dan berusaha mendakwahnya kepada orang lain. Misalnya, sekte-sekte rahasia keagamaan.

3) Gerakan Sosial Reformatif

Gerakan ini ingin merubah seluruh masyarakat namun dengan cara-cara apa saja dan terbatas. Tujuannya adalah mengubah perilaku masyarakat akan

suatu masalah. Gerakan ini tidak ingin menghancurkan dan mengganti pemerintah yang ada; mereka menginginkan pemerintah yang ada berubah dengan beberapa cara khusus. Gerakan reformatif dapat berupa gerakan yang bersifat progresif (menginginkan perubahan), maupun yang bersifat reaksioner (melawan perubahan). Gerakan reaksioner ini sering disebut juga sebagai *counter-movement* karena biasanya dibentuk setelah gerakan progresif berhasil membawa perubahan di masyarakat. Namun, baik gerakan progresif dan gerakan reaksioner keduanya menginginkan masyarakat yang lebih. Keduanya percaya satu perubahan tertentu adalah kunci untuk meningkatkan segala aspek di dalam masyarakat.

4) Gerakan Sosial Revolusioner

Gerakan ini ingin menghancurkan keseluruhan sistem tatanan sosial lama dan menggantikannya dengan tatanan yang baru. Gerakan ini bertujuan mentransformasikan secara mendasar seluruh anggota masyarakat. Gerakan ini menolak lembaga-lembaga sosial yang ada dan memaksakan alternatif yang benar-benar berbeda. Gerakan ini memiliki sebuah tatanan ideal dan diyakini kebenarannya untuk mewujudkan

masyarakat yang sempurna dengan sebuah prinsip dasar yang berbeda.

Selain ideologi yang menjadi dasar gerakan sosial. Peran aktor-aktor pemimpin organisasi juga perlu diperhatikan. Peran pemimpin inilah yang memobilisasi keyakinan sekelompok masyarakat menjadi sebuah gerakan.

2. Gerakan Islam

Untuk melihat mengenai politik Islam, maka dapat kita lihat dari aktivitas di kalangan politik Islam sebagai bagian dari komunitas bangsa yang secara otomatis akan ikut berpartisipasi dalam kehidupan negara (politik).

Secara detail, pengertian gerakan politik Islam hingga saat ini masih dalam perdebatan, sehingga sampai saat ini tidak ada pengertian atau definisi yang dapat dibakukan mengenai gerakan politik Islam. Akan tetapi, gerakan politik Islam dapatlah dipandang dengan mengambil obyek kajian berupa beberapa aktivitas politik di kalangan umat Islam, baik yang dilakukan secara individu maupun secara kelembagaan (parpol). Indikator untuk melihat dari politik Islam adalah melihat gerakan yang dilakukan Islam.

Secara umum, gerakan politik Islam dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Yang *pertama*, gerakan politik yang dilakukan

melalui institusi politik formal yang ada (gerakan struktur). Adapun yang *kedua* adalah gerakan yang dilakukan dengan pendekatan kultur, yaitu gerakan politik yang memakai media informal dari pada institusi politik (Politik formal) yang ada, misalnya melalui kegiatan dan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan sosial. Dalam diri umat Islam sendiri hal ini dilakukan berdasarkan substansi dari pada nilai yang ada di dalam bermasyarakat dan berbangsa.

Untuk melihat politik Islam menurut Bachtiar Effendy bisa dilihat dengan dua kecenderungan aktivitas politik umat Islam. *Pertama*, kecenderungan untuk menekan aspek legal formal idealisme politik Islam. Kecenderungan ini biasanya ditandai oleh keinginan untuk menerapkan Syari'ah secara langsung sebagai konstitusi negara. Kecenderungan *kedua*, menekankan substansi dari pada bentuk negara yang legal dan formal.¹⁹

Guna keperluan pemahaman terhadap gerakan Islam, kajian yang ditinjau akan bertolak terhadap dua paradigma, yaitu Islam Tradisional dan Islam Modernis. Studi mengenai Gerakan Modern Islam di Indonesia terutama yang dilakukan Deliar Noer,²⁰ membedakan Islam Tradisional dan Islam Modernis sekurang-kurangnya dari tiga aspek yaitu:

¹⁹. Bachtiar Effendy, "*Islam dan Negara*"- *Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta, Paramadina, cetakan pertama, 1998, hlm. 14-15

²⁰ Deliar Noer; *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1942*. LP3ES, cetakan pertama, Jakarta 1980, hal 1-36.

Pertama, semangat pemurnian ajaran. Semangat inilah yang menumbuhkan upaya-upaya yang tak kenal lelah dari Islam modernis untuk membersihkan ajaran Islam dari apa yang mereka sebut sebagai bid'ah, takhayul dan khurafat, yang menurut mereka masih dianut oleh kebanyakan masyarakat Islam di Indonesia terutama. Pada perkembangan selanjutnya, upaya pemurnian mereka mendapat reaksi balik dari komunitas-komunitas Muslim yang dianggap sebagai pelaku bid'ah, takhayul dan khurafat itu, yang kemudian memperoleh pijakan dalam gerakan-gerakan Islam tradisional.

Kedua, sikap tradisi yang bermazhab, khususnya dibidang fiqh, yang kemudian menimbulkan perselisihan disekitar masalah khilafiyah dan masalah taqlid. Islam modernis menggugat tradisi ini, sementara Islam tradisional mempertahankannya. Pembicaraan masalah khilafiyah sering kali meruncing karena bercampur dengan kepentingan politik sesudah kedua pihak menemukan saluran masing-masing dalam dunia politik.

Ketiga, sikap terhadap perubahan dan rasionalitas. Secara umum Islam Tradisionalis sebagai kurang menyukai perubahan dan lebih cenderung mempertahankan kebiasaan yang telah dianut,

sementara Islam modernis sebaliknya, menghendaki pembaharuan-pembaharuan.²¹

Dalam kaitannya dengan gerakan, maka ada satu hal tidak bisa lepas darinya, yaitu ideologi politik yang dianut oleh gerakan tersebut. Ideologi inilah yang kemudian menerangkan dan membenarkan suatu tatanan politik yang ada atau yang dicita-citakan, dan memberikan strategi berupa prosedur, rancangan, instruksi, dan untuk mencapainya.²² Dalam setiap level dari gerakan sampai negara, tentu memiliki ideologi politik masing-masing yang saling berbeda satu sama lain.²³ Bahkan ada juga yang menggunakan agama sebagai ideologi politik. Hal ini disebabkan agama tersebut mempunyai pandangan yang menyeluruh tentang kehidupan. Islam, contohnya adalah agama yang holistik.²⁴

Ideologi politik Islam inilah yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan berbasis Islam yang memiliki pandangan yang berbeda dengan basis gerakan lain. Secara umum basis gerakan Islam memiliki beberapa aliran pemikiran yaitu tradisionaisme, revivalis, modernism klasik, neo-revivalis dan neo-modernisme.²⁵

²¹ Imam Thalkhah dan Abdul Aziz; *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*. Jakarta: Putaka Firdaus, hal 3-4

²² B.N. Marbun, *kamus politik*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2007, hal. 193

²³ Deddy Ismatullah, Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu negara dalam multi perspektif (kekuasaan, masyarakat hukum dan Agama)*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hal. 93

²⁴ Ibid.

²⁵ Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press. 2000, hal. 13

- a. Tradisionalis yaitu pemikiran yang memegang kuat pikiran ulama Islam abad pertengahan. Golongan ini memandang bahwa pintu ijtihad telah tertutup sehingga respon terhadap persoalan yang ada saat ini harus merujuk pada kitab-kitab yang telah ditulis ulama terdahulu. Mereka menolak penerimaan pemikiran baru apalagi yang berasal dari barat untuk dijadikan acuan menyelesaikan pelaksanaan ajaran Islam untuk disesuaikan perkembangan zaman. Kelompok ini juga berpandangan bahwa ulama-ulama saat ini sudah tidak mampu berijtihad lagi karena kemampuan mereka tidak setara dengan ulama madzab terdahulu.²⁶
- b. Revivalis yaitu gerakan pemikiran yang muncul pada masa pra modernis. Beberapa ciri umumnya antara lain: keprihatinan terhadap kemerosotan sosio-moral masyarakat muslim, ajakan untuk kembali ke Islam orisinal dengan meninggalkan bid'ah, takhayul, dan khurafat (kepercayaan tradisi nenek moyang) yang sering ditanamkan dalam bentuk sufisme atau tarekat, menganjurkan untuk melakukan ijtihad serta meninggalkan kepercayaan bahwa madzab fikih tradisional telah sempurna. Gerakan ini berhubungan dengan pembaharuan tetapi berasal dari dalam Islam sendiri bukan dari Barat. Segala nilai-nilai yang

²⁶ Ibid, hal. 16

berasal dari Barat akan mencemari kemurnian Islam itu sendiri. Gerakan ini lebih menuntut keimanan dan kesucian yang ketat terhadap arti harfiah dari kitab suci tanpa mencari penafsiran yang sesuai dan bermakna.

- c. Modernisme klasik yaitu gerakan yang muncul pada pertengahan abad ke-19 beberapa ciri umumnya antara lain perluasan isi ijtihad termasuk membuka diri dengan masuknya pemikiran-pemikiran Barat. Menurut kelompok ini mengambil pemikiran yang ada di Barat bukan berarti harus menjadi westernis, tetapi pada prinsipnya merupakan mengambil kembali pemikiran-pemikiran Islam yang telah diambil oleh Barat di masa lalu. Pemikir modernism klasik juga melakukan penekanan terhadap pembaharuan dalam bentuk-bentuk pemerintahan, wakil pemerintah yang representative serta konstitusional. Pencapaian yang penting dari kaum modernis klasik ini adalah kemampuannya untuk merumuskan kaitan yang logis dan tepat dalam pemikiran barat seperti demokrasi, sains, pendidikan waniti dan tradisi Islam melalui Al-Qur'an dan Hadist.²⁷
- d. Neo-revivalis yaitu kelompok yang muncul sebagai reaksi dari gerakan modernism klasik. Gerakan ini timbul

²⁷ Ibid hal. 19

terutama dalam gerakan sosial yang terorganisir pada pertengahan pertama abad ke-20. Gerakan ini tidak menolak modernism klasik sepenuhnya terutama masalah substantif, diperlihatkan dengan dukungan terhadap ide-ide demokrasi, serta sistem pendidikan Barat. Demikian pula keyakinan bahwa Islam adalah keseluruhan sistem hidup, termasuk segi-segi sosial, politik dan ekonomi baik dimensi individual maupun kolektif. Adapun penolakan kaum neo-revivalis ini adalah penafsiran kaum modernis yang dapat dengan mudah dan terpengaruh oleh oleh pemikiran Barat yang tidak berdasarkan dengan Islam. Setidaknya tiga persoalan utama yang menjadi penolakan kaum Neo-Revivalis terhadap pemahaman modernism klasik yaitu bolehnya bunga bank, pemahaman longgar terhadap aurat wanita, keluarga berencana dan pengagungan akal.²⁸

- e. Neo- Modernisme yaitu gerakan pemikiran yang muncul untuk mengoreksi pemikiran yang muncul sebelumnya (modernism). Pemikiran ini melihat upaya gerakan modernis untuk melihat kenyataan yang ada dan mencari jawabannya yang tepat dalam Al-Qur'an adalah sebuah hal yang tepat. Penekanan pemikiran ini adalah penguatan metodologi yang tepat, sistematis, komprehensif dan

²⁸ *Ibid*, Hal. 21

berjangka panjang sehingga tidak tergelincir menjadi seorang westernis.²⁹

Akan tetapi penulis menyadari bahwa teori yang dikemukakan tidaklah dapat men-generalisasikan suatu gerakan dengan sangat tepat atau sempurna. Hal ini disebabkan karena ada kemungkinan jika suatu gerakan memiliki ciri yang hampir sama diantara dua pemikiran atau bahkan lebih.

3. Gerakan Salafi

Salafi merupakan gerakan revivalis yang kemudian hadir dikalangan masyarakat sebagai bentuk perubahan baru (tajdid) dalam mengenal ajaran Islam sesuai Al-Qur'an dan As-sunnah yang murni tanpa ada campuran-campuran lainnya yang justru menjadikan ajaran atau amalan tersebut menjadi bid'ah.

Namun, sayangnya model gerakan revivalis Salafi sendiri mengalami banyak pengaruh yang membuat gerakan ini terpecah, tidak terkecuali Indonesia. Meskipun kaum Salafi berusaha menolak pernyataan perpecahan dalam gerakan mereka, namun faktanya banyak kelompok yang secara tegas mengklaim diri mereka sebagai Salafi.

Selama ini muncul persepsi kuat bahwa Salafi di Indonesia terpecah dalam dua kelompok besar yang satu sama lain saling bertentangan. Satu kelompok ialah Salafi Yamani yang merupakan jaringan para da'i Salafi yang merujuk kepada syaikh-syaikh Salafi di

²⁹ *Ibid*, Hal. 23

Yaman dan Timur Tengah. Sedangkan satu kelompok lagi ialah Salafi Haraki, yaitu dakwah Salafi yang menerapkan sistem pergerakan (Harakah).

Dengan realita perpecahan tersebut, mustahil untuk dapat mendeskripsikan kelompok tersebut hanya dengan sebutan Salafi saja, sebab komunitas-komunitas Salafi itu ternyata berbeda-beda pandangan dan pendiriannya. Begitu pula tidak mungkin kita keluarkan mereka semua dari Salafi, sebab mereka memang mengikuti ajaran-ajaran Salafush Shalih. Paham Salafi masuk ke Indonesia bermacam-macam warnanya.

Fakta bahwa ada perpecahan Salafi yang banyak diketahui sebagai Salafi Haraki dan Salafi Yamani, sebenarnya dua nama tersebut baru awalnya saja, masih banyak nama-nama Salafi lain seperti Salafi Sururi, Salafi Wahdah Islamiyyah, Salafi Turotsi, Salafi Ghuroba, Salafi MTA, Salafi Persis, Salafi Ikhwani, Salafi Hadadi, Salafi Turoby dan ini belum termasuk kelompok Salafi yang telah ditahdzir dan kemudian taubat, tetapi tidak bergabung dengan salafi "asli" dan membentuk kelompok-kelompok sendiri.

Warna yang paling asli ialah dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang dibawa oleh ulama-ulama Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Di era moderen, Salafi masuk melalui beberapa jalur, antara lain melalui buku-buku, media, proses pendidikan, kerjasama kelembagaan, dan jalur gerakan dakwah Salafi. Jalur buku berupa buku asli dalam bahasa Arab, juga berupa terjemahan dari kalangan ulama-ulama Timur

Tengah. Jalur pendidikan yang berupa pengiriman pemuda-pemuda yang dikirim untuk belajar di Timur Tengah. Kerjasama kelembagaan berupa bantuan buku-buku dan fasilitas belajar, pembangunan perpustakaan, masjid, dan sebagainya serta jalur gerakan dakwah Salafi berupa pendidikan kader da'i, pembukaan majelis-majelis taklim dan lainnya.

Telah disadari perbedaan itu, maka peneliti lebih fokus pada pemikiran besar da'i-da'i Salafi, dimana pemikiran tersebut cenderung sama, sehingga akan memudahkan penelitian mengenai gerakan revivalis Salafi ini.

4. Politik dalam Islam

Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah*. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama salafush shalih dikenal istilah *siyasah syar'iyah*, misalnya. Dalam Al Muhith, *siyasah* berakar kata *sâsa - yasûsu*. Dalam kalimat *Sasa addawaba yasusuha siyasatan* berarti *Qama 'alaiha wa radlaha wa adabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). Bila dikatakan *sasa al amra* artinya *dabbarahu* (mengurusi/mengatur perkara).³⁰

Jadi, asalnya makna *siyasah* (politik) tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan. Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia; dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus (*siyasiyun*). Dalam realitas bahasa

³⁰ Hafidz Abdurrahman, *Islam: Poltik dan Spiritual*. Singapore: Lisan Ul-Haq, 1998. Hal 189

Arab dikatakan bahwa *ulil amri* mengurus (yasûsu) rakyatnya saat mengurus urusan rakyat, mengaturnya, dan menjaganya. Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya :

"Adalah Bani Israil, mereka diurus urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah" (HR. Bukhari dan Muslim).

Teranglah bahwa politik atau *siyasah* itu makna awalnya adalah mengurus urusan masyarakat. Berarti secara ringkas Politik Islam memberikan pengurusan atas urusan seluruh umat Muslim.

Disebutkan dalam sebuah hadist yaitu:

"Seseorang yang ditetapkan Allah (dalam kedudukannya) mengurus kepentingan umat, dan dia tidak memberikan nasihat kepada mereka (umat), dia tidak akan mencium bau surga." (HR. Bukhari dari Ma'qil bin Yasar ra)

Oleh sebab itu, Islam telah menetapkan asas bagi sistem politiknya, yang terdiri dari empat macam: (1) Kedaulatan ditangan Syara' (*as-siyada li syar'i*), (2) Kekuasaan di tangan umat (*as-shultan li al- ummat*), (3) Pengangkatan satu khalifah untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib (*wujub nashbi al-khalifah al-wahid li al-muslimin*), (4) Khalifahlah satu-satunya orang yang berhak untuk mengambil dan menetapkan hukum syara' untuk menjadi undang-undang (*li al-khalifah wahdah haq at-tabanni*).³¹ Sedangkan pendapat-pendapat para orientalis adalah sebagai berikut:

³¹ Lebih lanjut lihat Hafidz Abdurrahman, *Ibid.* Hal 189-194

Fitzgerald dalam Muhammedan law³²:

"Islam bukanlah semata agama (*a religion*), namun ia juga merupakan sebuah sistem politik (*a political system*). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam, yang mengklaim diri mereka sebagai kalangan 'modernis', yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundamental bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain".

Kemudian pendapat orientalis lain, Dr. Schacht mengemukakan:

"Islam lebih dari sekedar agama: ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan."³³

Pendapat di atas diperkuat oleh fakta-fakta sejarah. Diantara fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri siapa pun adalah, setelah timbulnya dakwah Islam, kemudian terbentuk bangunan masyarakat baru yang mempunyai identitas independen yang membedakannya dari masyarakat lain. Mengakui satu undang-undang, menjalankan kehidupannya sesuai dengan sistem yang satu, menuju kepada tujuan-tujuan yang sama, dan di antara individu-individu masyarakat yang baru itu terdapat ikatan ras, bahasa, dan agama yang kuat, serta adanya perasaan solidaritas secara umum. Bangunan masyarakat yang memiliki semua unsur-unsur tadi itulah yang dinamakan sebagai bangunan masyarakat politik.³⁴

³² M. Dhiauddin Rais, 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press hal 5.

³³ Ibid, hal.6

³⁴ Ibid, hal. 6-7

Politik dalam Islam juga hendaknya dimaknai sebagai upaya manusia meraih kesempurnaannya atau perjalanan menuju kemaslahatannya. Dengan pemahaman ini politik bernilai luhur, sakral dan jelas-jelas tidak bertentangan dengan agama. Setiap manusia yang beragama niscaya berpolitik. Oleh karena itu berpolitik merupakan sesuatu yang *inherent* dengan kemanusiaan.

Pemikiran politik Islam pada umumnya merupakan produk perdebatan besar yang terfokus pada masalah religi politik tentang imamah dan kekhalifahan. Sebagaimana kita ketahui Nabi Muhammad saw. adalah seorang politikus, disamping sebagai muballigh, pengajar dan hakim, beliau adalah pemimpin daulah dan pemimpin ummat. Begitu pula dengan empat khalifah sesudahnya yang lebih dikenal dengan *Khulafa Al-Rasyidin*. Mereka mengikuti cara nabi dalam mengatur ummat secara adil dan baik berdasarkan ilmu dan iman (kepercayaan).

Dalam Piagam Madinah dapat dilihat bahwa hubungan antara pemimpin agama dimana Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama Islam yang sangat dominan jumlahnya saat itu dengan pemimpin nasrani yang merupakan kaum minoritas terjalin dengan sangat baik. Keduanya melakukan perjanjian berdasarkan keadilan Islam dan bersumber dari Al-Qur'an tetapi tidak mengesampingkan hak-hak ummat yang lainnya yang berada di madinah saat itu.³⁵

³⁵ Osman Nazrey Abdillah, 1442h. *Mengapa Harus Negara Islam*. Darul Islam 10.

Perkembangan Islam sejak kemunculannya lebih banyak ditandai dengan nuansa politik, sehingga melihat perkembangan Islam harus dikaitkan dengan aktifitas politik. Sejarah menunjukkan, Islam mulai tampil di pentas politik semenjak Rasulullah hijrah ke Madinah tahun I Hijriah bertepatan dengan tahun 622 M. Hanya dalam waktu sebelas tahun, kekuasaan pemerintahan beliau meliputi semenanjung Arabia. Kemudian memasuki abad 8 dan 9 M wilayah itu membentang dari Maroko bahkan menyeberang ke Spanyol hingga India.

Pada sisi lain, atas dasar ayat Al-Qur'an "Tiada aku lewatkan di dalam Al-Kitab ini sesuatu apapun," ditambah "Saya tidak mengutusmu kecuali mendatangkan kesejahteraan bagi alam semesta" maka segera disimpulkan bahwa ajaran Islam itu lengkap meliputi berbagai dimensi kehidupan. Menata kehidupan ekonomi, kehidupan politik dan kehidupan dalam dimensi lain, orang Islam merasa optimis, sebab diyakini pedomannya sudah ada. Meskipun fakta empirik menunjukkan bahwa perilaku politik masyarakat Islam berbeda dari waktu ke waktu.

Jawaban atas pertanyaan tentang hubungan antara Islam dan politik (kekuasaan kenegaraan) dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, kelompok yang berpandangan bahwa Islam bukan agama dalam paham Barat, yang hanya mengurus hubungan manusia dengan Tuhan saja. Sebaliknya Islam adalah agama yang lengkap. Di dalamnya terdapat sistem kenegaraan. Orang perlu merujuk ketatanegaraan Eropa. Rujukan pemikiran politik Islam adalah sistem kenegaraan yang dilaksanakan oleh

Rasulullah SAW dan Khulafa Al-Rasyidin. Pendukung kelompok ini antara lain Hasan Al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha dan Al-Maududi.

Kedua, Kelompok yang berpandangan bahwa Islam itu agama sebagaimana yang dipahami Barat. Nabi Muhammad hanya seorang Rasul sebagaimana para Rasul sebelumnya, tidak otomatis memegang kekuasaan politik. Tugas seorang rasul yang begitu mulia, mengajak manusia di atas rel-rel yang benar dan budi pekerti yang luhur, tidak dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Pendukung kelompok ini antara lain, Ali Abdul Raziq dan Dr. Tahah Husain.

Ketiga, kelompok yang menolak bahwa Islam itu lengkap seperti pendapat pertama, tetapi juga menolak bahwa Islam itu seperti yang dipahami Barat. Kelompok ini berpandangan bahwa di dalam Islam tidak ada sistem politik atau kenegaraan, tetapi terdapat prinsip-prinsip dan nilai etika bagi kehidupan bernegara. Pendukung kelompok ini antara lain, Dr. M. Husain Haikal dan Fazlur Rahman.³⁶

5. Relasi Perempuan dan Politik dalam Islam

Hal pertama yang harus diapresiasi dari agama Islam adalah bahwa ada banyak penafsiran tentangnya. Islam memiliki suatu aspek-aspek keagamaan tertentu yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.³⁷

³⁶ Muhammad Zuhri, 2002. *Sejarah Politik Islam, Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*. Hal. 3-12

³⁷ .Kurzman, Charles (ed). 2001. *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*. Jakarta: Paramadina, hal. 146

Islam memandang wanita dari sudut keimanan sebagai individu anggota umat yang dikaitkan dengan individu yang lain dengan ikatan akidah. Yang dimaksud ikatan akidah ini ialah sebuah ikatan yang membentuk gerakan politik yang berperan sebagai motor penggerak aktivitas umat dengan mewujudkan syariat yang menjadi hukum umat.

Sudah banyak sekali tulisan yang menyangkut hak-hak asasi wanita dalam Islam. Akan tetapi, setelah melihat tanggung jawab politiknya pada perangkat umat, tidak ditemukan perhatian yang memadai tentang itu. Dalam hal ini sebagian orang beranggapan bahwa wanita tidak mempunyai keahlian untuk ikut serta dalam kegiatan politik, sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa wanita memiliki keahlian untuk itu.³⁸

Apabila sebagian besar tulisan Islam telah menetapkan hak-hak yang mesti diperoleh wanita di bawah naungan Islam, sebenarnya hal itu mengadopsi konsep pembagian sosial dalam kerja. Atau dengan kata lain, sesungguhnya bidang yang patut diterjuni oleh wanita adalah keluarga, dan pada saat yang sama lelaki dapat memikul tanggung jawab ekonomi dan politik.

Walaupun ada ketetapan yang dinyatakan oleh tulisan tersebut bahwa wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan lelaki yang pada dasarnya dalam pandangan Islam- sesungguhnya kecenderungan

³⁸. Hibah Rauf 'Izzat. 1997. *Wanita dan Politik Pandangan Islam*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, hal.78

yang berlaku adalah pengutamaan terhadap konsep yang tidak melibatkan wanita di dalam kegiatan politik.

Bahkan, sebagian orang mengatakan bahwa kegiatan politik diharamkan bagi wanita demi menjaga agar masyarakat tidak turun martabatnya kemudian jatuh. Padahal sejarah mencatat bahwa wanita, baik termasuk kalangan sahabat atau tabi'in, telah menjadi saksi berbagai peristiwa sejarah di masa itu.³⁹

Penulis mencoba membagi dua pemikiran besar terkait kedudukan wanita dalam politik sebagai berikut:

Pertama, pemikiran yang menganggap wanita itu tidak berhak sama sekali dalam wilayah urusan politik. Secara garis besar mereka menganggap wanita itu makhluk yang paling banyak kekurangannya.

Sebenarnya kekurangan selama ini yang banyak diperdebatkan oleh ulama terkait hadist Rasulullah saw:

“Wahai kaum wanita, bersedakahlah karena sesungguhnya saya melihat kebanyakan kalian menjadi penduduk neraka”. Mereka berkata: ‘Mengapa wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab: “Kalian banyak melakukan laknat dan meninggalkan keluarga. Saya tidak melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang melebihi orang yang meninggalkan suaminya daripada kamu sekalian.’ Mereka berkata: ‘Apakah kekurangan agama dan akal kami wahai Rasulullah?’ Rasulullah saw. Menjawab: ‘Bukankah kesaksian wanita sama dengan setengah kesaksian lelaki?’ Mereka berkata: ‘ya’. Rasulullah bersabda: ‘Itulah kekurangan akalnya. Bukankah apabila wanita sedang haid, dia tidak salat dan tidak berpuasa?’ Mereka berkata: ‘ya.’ Rasulullah saw. Bersabda: ‘itulah kekurangan agamanya.”

³⁹ Ibid hal. 79- 85

Dari sabda di atas, kemudian sebagian ulama pengikut pemikiran ini mulai berbicara tentang tabiat wanita yang kurang dan bengkok moralitasnya, serta cenderung untuk mengikuti hawa nafsu. Sebaliknya, lelaki memiliki tabiat yang unggul dari segi kesiapan mereka untuk bangkit mengemban tugas-tugas kemasyarakatan.⁴⁰

Ada dua alasan ulama yang mengharamkan perempuan menjadi pemimpin. Pertama, berhujah dengan ayat Al-Qur'an yang berikut:

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz (meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya), hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka; tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar". (QS. An-Nisa: 34)⁴¹

Kedua, mereka berhujah dengan Hadits yang berasal dari Abi Bakrah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan bahagia suatu kaum yang mengangkat pemimpin mereka seorang perempuan". Pengikut pemikiran ini salah satunya yaitu dari kelompok sunni.

Pemikiran besar yang kedua yaitu pemikiran jika sesungguhnya wanita memiliki hak dalam suatu aktifitas politik. Menurut pemikiran ini larangan atas wanita dalam wilayah politik atau ada keterkaitannya dengan

⁴⁰ Lebih lanjut lihat Ibid, hal. 83

⁴¹ Lihat terjemahan QS. An-Nisa ayat 34

kekuasaan yang tertera dari hadist dan ayat Al-Qur'an di atas (An-Nisa: 34), tidak harus dipahami demikian, menurut mereka ayat serta hadist tersebut cenderung diartikan dalam konteks kehidupan rumah tangga. Kelompok pengikut pemikiran ini, beranggapan jika di sisi lain cukup banyak ayat Al-Qur'an dan hadist yang dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak tersebut.

Salah satu ayat yang sering kali dikemukakan oleh pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam Al-Qur'an:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah *auliya*⁴² bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 71)⁴³

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat: “menyuruh untuk mengerjakan yang makruf dan mencegah yang mungkar.”⁴⁴

Menurut sementara berpikir, dalam sabda Nabi saw.:

“Barang siapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka,”⁴⁵

⁴² Kata *auliya* dalam pengertiannya mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh “menyuruh mengerjakan makruf” mencakup segala segi kebaikan/perbaikan hidup.

⁴³ Lihat terjemahan Qs. At-Taubah ayat 71.

⁴⁴ Meuleman, Johan Hendrik dkk. (red). Kumpulan Makalah Seminar: *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS, 1993 hal. 14.

⁴⁵ Ibid.

Kepentingan/urusan kaum muslimin mencakup pria dan wanita sebagaimana mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai latar belakang pendidikan atau tingkat pendidikan seseorang, sehingga dengan demikian kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik.

Oleh karena itu, keterlibatan wanita dalam politik menurut pemikir yang penulis sebutkan sebagai pemikiran besar yang kedua ini, dianggap sah-sah saja asal tidak meninggalkan fitrahnya sebagai ibu dari anak-anak serta perannya sebagai istri. Sebagaimana mereka mengutip dalam tulisan al-Gazali:

“Ketika kita tidak menyetujui dan menolak secara keras keadaan kaum wanita pada abad yang lalu, maka itu dibanding dengan keadaan wanita pada masa awal Islam. Adapun dibanding dengan keadaan hidup wanita di Eropa dan Amerika sekarang, maka kita berkeyakinan bahwa wanita yang tidak bekerja lebih baik daripada wanita yang bejat,... wanita yang terkurung di rumah tempat tidur atau yang terbatas (pekerjaannya) dalam mengurus suami dan anak, lebih baik daripada mereka yang terbuka bagi semua mata atau tidak menolak setiap sentuhan tangan.

Islam mempersamakan antara kedua jenis (lelaki dan perempuan) dalam segala macam pekerjaan yang baik, yang paling baik diantara mereka di sisi Allah adalah yang paling suci niatnya dan paling banyak usahanya.”⁴⁶

F. DEFINISI KONSEPSIONAL

Definisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan lainnya

⁴⁶ Ibid. hal. 17

agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun definisi konseptual yang digunakan adalah:

1. Perspektif merupakan seperangkat asumsi dasar tentang hal paling penting yang bisa dipertimbangkan sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk memahami perilaku sosial. Jadi, disini selain ingin mengetahui asumsi dasar mengenai isu yang menjadi objek penelitian, penulis juga berusaha memahami wujud dari nilai-nilai atau perilaku kelompok Salafi yang berasal dari asumsi dasar tersebut.
2. Perspektif terhadap perempuan dan politik adalah proses dimana seseorang menafsirkan atau memahami berdasarkan pengalaman, pengetahuan konsepsi, motivasi dan lingkungan terkait relasi perempuan dan politik serta tindakan atas pemahaman yang telah dimilikinya tersebut.
3. Gerakan Islam adalah suatu kelompok yang terorganisir untuk melakukan suatu perubahan kondisi yang ada berdasarkan syariat Islam yang benar yang diyakini sebagai dasar atau pedoman gerakan tersebut.
4. Gerakan Salafi adalah suatu gerakan yang memiliki tujuan utamanya untuk memurnikan ajaran Islam dari Tahayul, Bid'ah, dan Khurafat (puritan), dengan menggunakan kaidah atau cara-cara yang sama dengan Salaf (orang-orang terdahulu). Salaf yang dimaksudkan ialah 3 (tiga) generasi awal pada zaman nabi

Muhammad saw. Generasi tersebut yaitu generasi *Sahabat* berarti generasi para sahabat nabi dimana nabi Muhammad saw sendiri masih hidup. Kemudian generasi *Tabi'in* merupakan generasi setelah sahabat yang notabene murid-murid sahabat nabi. Serta *Tabi'ut Tabi'in* dimana merupakan generasi ketiga dari sahabat selanjutnya setelah Tabi'in, dimana mereka mengumpulkan semua pendapat dan penafsiran al-Qur'an yang dikemukakan oleh para ulama-ulama sebelum mereka.

5. Relasi Perempuan dan Politik merupakan keterkaitan perempuan dalam wilayah politik, baik pada internal maupun eksternal politik itu sendiri. Telah dijabarkan politik yang dimaksud penulis yaitu wilayah internal pemerintahan yang difokuskan pada perspektif Salafi tentang pemimpin wanita, emansipasi wanita dalam wilayah politik (sebagai anggota DPR misalnya atau masuk dalam institusi pemerintahan lainnya), serta partisipasi dalam pemilu (pemberian suara). Sementara wilayah eksternal politik yang dimaksud yaitu perannya sebagai warga negara pada wilayah politik dalam artian politik Islam (dakwah sebagai jalan mengurus urusan umat).

G. ASPEK PENELITIAN

Untuk mengetahui perspektif gerakan Salafi terhadap relasi perempuan dan politik maka aspek penelitian yang digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Relasi Perempuan dan Politik Menurut Salafi
 - 1.1. Emansipasi Wanita
 - 1.2. Kepemimpinan Wanita
 - 1.3. Partisipasi Dalam Pemilihan Umum
 - 1.4. Dakwah Wanita Sebagai Wujud Mengurus Urusan Umat

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif (Kualitatif). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupaya mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena; pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teknik Riset Survey (*Survey research*). Dimana peneliti tidak melakukan perubahan (tidak ada perlakuan khusus) terhadap variabel yang diteliti.

2. Jenis Data

Berdasarkan cara pengambilannya, data terbagi menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

a) Data Primer

Menurut Lexy, data primer adalah data yang diambil dari sumber data secara langsung oleh peneliti atau yang mewakilinya di mana peneliti melakukan pengukuran sendiri.⁴⁷

b) Data Sekunder

Adalah data yang diambil tidak dari sumber langsung asli. Misalnya data yang diperoleh dari buku, dari suatu dokumen, atau bisa juga dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti lain atau sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dan informasi dalam menyelesaikan laporan ini adalah sebagai berikut:

a) Teknik Dokumentasi

Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan obyek penelitian berupa buku-buku, surat-surat, catatan, laporan, perundang-undangan serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terdapat dalam lokasi penelitian.

Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan pencatatan-pencatatan atau pengambilan gambar-

⁴⁷ Lexy.J. Moleong. 2006. *“Metodologi penelitian Kualitatif”*(Edisi Revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

gambar dari dokumentasi yang terdapat ditempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti.⁴⁸

b) Teknik Wawancara/Interview

Wawancara adalah usaha mengumpulkan data berupa informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka (*face to face relationship*) antara si pencari informasi (*interviewer atau information hunter*) dengan sumber informasi.⁴⁹

Peneliti menggunakan jenis wawancara secara terstruktur, dengan 7 (tujuh) narasumber yang disebutkan dalam unit analisa.

c) Teknik Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Disini Peneliti melakukan observasi dengan mengikuti acara kajian gerakan Salafi di sekitar kampus Universitas Gadjah Mada, kajian dilaksanakan di Masjid Kampus UGM dan Masjid Al-Ashri di wilayah Pogung Rejo.

Observasi tersebut menunjukkan, meskipun sebelumnya Salafi menolak pernyataan jika Salafi adalah sebuah gerakan, namun ditemukan jika secara tidak langsung kajian-kajian yang

⁴⁸. Winarno Surachmand. 1978. *Dasar dan Teknik Reseach*. Bandung: Tarsito. Hal.135

⁴⁹. Hadari Nawawi.2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal.118

ada, dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk dari gerakan dengan tujuan memperbaiki aqidah umat Islam (puritan).

4. Unit Analisa

Berdasarkan permasalahan pada pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka unit analisa yang peneliti tentukan yaitu pihak-pihak yang terkait dan relevan dengan pembahasan yang tepat untuk dijadikan sumber data. Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini antara lain yaitu:

- a) Ustad Aris Munandar, selaku salah satu Ustad Senior Salafi dari YPIA (Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari).
- b) Ustad Abu Abdirrohman, salah satu ustad dari Yayasan Wahdah Islamiyah.
- c) Ustad Ja'far Umar Thalib, Pendiri Pesantren Salafi Ihya' As-sunnah Degolan, Sleman. Salah satu pembawa pengaruh ajaran Salafi di Yogyakarta.
- d) Salah satu masyarakat di Yogyakarta yang mengikuti manhaj Salaf, (Abu Ubaidirrahman).
- e) Wanita-wanita Salafi, ada 3 responden yang di wawancara oleh peneliti. Yaitu:

1.1. Ummu Usama (Istri Ustad Zein, Salah satu Ustad di Pondok Pesantren Sawo, Jamilurrahman)

1.2. Ummu Fathy (Wanita Salafi yang bermukim di Jamilurrahman)

1.3.Ummu Zaenab (Istri salah satu Ustad di Pondok
Pesantren Sawo, Jamilurrahman).

5. Teknik Pengambilan Sampling

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana teknik pengambilan sampel dilakukan melalui pembatasan sampel sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁵⁰

⁵⁰. Ibid. Hal. 57